

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pemerintah sebagai pelaksana utama dalam Negara mempunyai peran yang sangat penting demi berlangsungnya proses pembangunan baik pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur dan pembangunan lainnya. Sebagaimana pemerintah dituntut untuk mampu menjadi penyelenggara Negara dalam mewujudkan perkembangan, kemajuan serta mampu menjadi faktor pendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat. Sehingga untuk melihat tingkat perkembangan dan kemajuan masyarakat dilihat dari tingkat pelayanan, pemerintah kepada masyarakat itu sendiri.

Peran pemerintah tidak terlepas dari bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap peningkatan daya saing masyarakat. Melihat yang terjadi pada saat ini bahwa masyarakat di era modern dengan begitu pesat dan berkembangnya ilmu teknologi dan komunikasi sehingga dapat mengindikasikan untuk semua masyarakat harus mampu mempersiapkan dirinya untuk terus mengembangkan potensinya yang kemudian tidak hanya bersumber dari kalangan masyarakat sekitarnya saja akan tetapi juga menjadi tugas pokok bagi pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah untuk terus berperan aktif dalam mengawal, dan mendampingi masyarakat dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintah sehingga mampu mengambil bagian yang strategis demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan efektivitas dan efisiensi harus menjadi tolak ukur utama bagi pemerintah agar semua elemen masyarakat mampu menerima serta menerjemahkan segala bentuk keputusan pemerintah, sehingga dengan adanya keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut maka pemerintah akan lebih mampu menyelenggarakan roda pemerintahan baik pada tingkat pusat maupun daerah. Masyarakat menjadi objek utama dalam keberhasilan atau kegagalan pemerintah dalam menjalankan tugasnya bahwa berhasil tidaknya pemerintah dilihat dari peningkatan atau penurunan tingkat kehidupan masyarakat. Pemerintah juga harus mampu berperan penting untuk mengikutsertakan seluruh elemen masyarakat untuk ikut terlibat dan berpartisipasi dalam proses pengembangan masyarakat sehingga dengan ikut sertanya seluruh elemen masyarakat maka pemerintah akan lebih mudah untuk memahami hal-hal yang terdapat di masyarakat.

Telah diatur dalam regulasi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya pada Bab III mengenai penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya bahwa dalam hal pengembangan untuk memperkuat kelembagaan masyarakat maka pemerintah harus mampu menerapkan serta melaksanakan kegiatan melalui apresiasi, sosialisasi, fasilitasi, pendampingan kelembagaan, dan pelatihan. Dengan demikian seharusnya pemerintah melakukan pembinaan kelembagaan kelompok petani secara berkesinambungan dan berorientasi pada pola pengembangan masyarakat, yang kemudian diarahkan kepada pola pikir petani

dalam menerapkan sistem pertanian baik pada kelompok pertanian mikro maupun makro, sehingga dengan adanya pembinaan dari pemerintah yang diharapkan mampu berperan aktif terhadap kelompok petani sehingga dapat memaksimalkan program pemerintah dalam pengembangan serta kemajuan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dapat terwujud.

Desa memiliki peran yang penting dalam memberikan pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Karena pemerintahan desa secara umum memiliki wewenang yang strategis untuk mengendalikan kehidupan masyarakat atau dengan kata lain pemerintah desa memiliki seperangkat aturan baku yang tertulis yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam Undang-Undang Tentang Desa menyebutkan bahwa desa mempunyai empat kewenangan yakni kewenangan berdasarkan hak asal usul, (*rekognisi*), kewenangan lokal berskala Desa (*subsidiarity*), kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.

Pemerintah dituntut memberikan pelayanan yang lebih serta memberdayakan masyarakat, sehingga masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan untuk kemajuan wilayahnya dan mendapatkan kesejahteraan, karena masyarakatlah yang lebih tahu apa yang mereka butuhkan. Pemberdayaan kelompok tani sendiri adalah upaya meningkatkan kemampuan dan memandirikan masyarakat tani dalam meraih kesejahteraan. Untuk mencapai

tujuan tersebut, diperlukan suatu upaya yang dapat memberdayakan petani dalam meningkatkan produktivitasnya.

Salah satu kebijakan mendasar untuk mengatasi masalah dalam pertanian adalah membentuk Kelompok Tani. Dengan adanya Kelompok Tani akan mempermudah petani dalam meningkatkan produktivitas. Tujuan dibentuknya Kelompok Tani agar menjadi wadah komunikasi antar petani yang mempunyai tujuan dan minat yang sama. Pemberdayaan Kelompok Tani merupakan hal yang penting jika menginginkan adanya kemajuan di sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pemberdayaan Kelompok Tani ini juga mempengaruhi kemajuan Desa yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani.

Masyarakat di Desa Noepesu Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara, pada umumnya hidup dari bertani dengan potensi kekayaan alam yang menjanjikan. Kegiatan kelompok tani dapat berkembang jika adanya dukungan dari pemerintah yang melihat potensi kelompok tani yang cukup aktif dalam menciptakan inovasi-inovasi yang dapat membawa kemajuan bagi desanya. Dari asset usaha tani yang dikelola, tentunya dapat memberikan manfaat bagi anggota kelompok tani maupun bagi masyarakat.

Pemerintah Desa Noepesu dalam melakukan pemberdayaan masyarakat kelompok tani terlihat dari diunggulkannya sektor pertanian sebagai komunitas utama dikarenakan keadaan masyarakat di Desa Noepesu memiliki potensi besar sebagai produsen pertanian. Ditambah lagi kondisi lahan di desa Noepesu terbilang cukup subur dan dapat dipergunakan sebagai lahan pertanian, bahkan

jika benar-benar dikembangkan, sektor pertanian dapat menjadi sumber penghasilan yang dominan bagi masyarakat di desa Noepesu. Mata pencaharian masyarakat di Desa Noepesu mayoritas sebagai seorang Petani. Petani di Desa Noepesu biasanya menanam wortel, kentang, kopi, jeruk, bawang putih, dan bawang merah. Desa Noepesu merupakan wilayah dataran tinggi dengan jumlah penduduk 1542 jiwa dan 415 KK dengan mata pencaharian bervariasi.

Sebagai wilayah yang bermata pencaharian paling tinggi sebagai petani maka perlu adanya pembentukan kelompok tani sehingga dapat membantu para petani untuk mengelola potensi pertanian yang ada di Desa Noepesu. Maka sebagai wilayah yang memiliki potensi pertanian yang tinggi berbagai program pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah seperti adanya bantuan pada kelompok tani baik berupa pemberian modal usaha, bantuan bibit, pupuk atau penyuluhan seputar pertanian. Maka dari itu perlu adanya perhatian dan peran dari pemerintah dalam sektor pertanian melalui strategi pemberdayaan bagi masyarakat khususnya para petani.

Tabel 1.1
Keadaan Ketua Kelompok Tani Desa Noepesu Tahun 2023

No	Nama kelompok	Nama ketua	Jumlah anggota	Jenis usaha	Tahun berdiri
1	Oel Aijao	Dominggus Anin	17	Hortikultura	2001
2	Oelatfob	Darius Banfatin	16	Hortikultura	2006
3	Pelita Karya	Petrus Tefa	17	Hortikultura	2008
4	Pelita jaya	Yoseph Poli	20	Perkebunan	2009
5	Setia kawan	Mikhael Poli	20	Perkebunan	2009

Sumber data: Desa Noepesu, 2023

Dari tabel 1.1 tersebut dapat dijelaskan bahwa masyarakat kelompok tani di desa Noepesu memiliki 5 kelompok tani yang mulai terbentuk pada tahun 2001 dengan jenis tanaman pekebunan sayur dan hortikultura (Buah-buahan) yang masing-masing kelompok terdiri dari 15 -20 anggota yang terdaftar dan teregistrasi di Kantor Desa Noepesu. Kelompok tani yang ada di Desa Noepesu masih menjalankan rutinitasnya sebagai petani dan sebagiannya lagi sudah tidak beroprasional. Berdasarkan wawancara yang peneliti dengan Ketua kelompok tani yang ada di Desa Noepesu menyampaikan bahwa ada beberapa permasalahan yang di hadapi oleh petani yang ada Desa Noepesu ini seperti kurangnya keterlibatan petani dalam kegiatan sekolah lapangan pertanian seperti kurang diadakannya pembinaan secara berkelanjutan, sebagai wadah pengembangan keterampilan petani dalam mengelola usaha taninya. Selama ini yang dilibatkan dalam sekolah lapangan pertanian hanya ketua kelompoknya saja atau orang-orang tertentu yang ditunjuk setiap ada pelatihan itu-itu saja sehingga anggota kelompok yang lainnya tidak dilibatkan. Dan setiap ada pemberian bantuan dari Desa maupun Kabupaten baik berupa pupuk, bibit, alat pertanian, bantuan yang diberikan tidak merata bahkan ada anggota kelompok tani yang dari awal terbentuk hingga saat ini belum menerima sama sekali. Hal inilah yang menyebabkan petani di Desa Noepesu kurang memiliki kemampuan dalam mengelola usaha taninya. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat melakukan kajian tentang “PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DI DESA NOEPESU

KECAMATAN MIOMAFFO BARAT KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Noepesu Kecamatan Miomaffo Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka, tujuan penelitian yang ditetapkan adalah: Untuk mendeskripsikan Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Noepesu Kecamatan Miomaffo Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbaikan untuk mengembangkan penelitian yang dilakukan selanjutnya tentang teori ilmu administrasi negara yang berkaitan dengan Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan khususnya Kelompok Tani.

2. Secara Praktis

a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi pemerintah dalam menjalankan perannya untuk memberdayakan masyarakat pada kelompok tani yang ada di Desa Noepesu.

- b. Bagi Peneliti Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman peneliti serta menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.